

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Maritim: Dampaknya pada Peningkatan Pengetahuan dan Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir

Muhamad Saifullah^{1*}, Nurwandayani², Andi Nursida³ Sam'un Mukramin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar

*Email: saifullahmuhamad40@gmail.com

Abstrak

Evaluasi kebijakan pendidikan maritim merupakan langkah penting dalam mengukur dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Evaluasi ini mencakup beberapa dimensi kunci, pertama adalah aksesibilitas pendidikan maritim. Penilaian terhadap lokasi sekolah maritim, ketersediaan beasiswa, dan infrastruktur pendidikan membantu memastikan kesetaraan akses pendidikan di komunitas pesisir. Kualitas pembelajaran juga menjadi fokus, dengan penilaian terhadap metode pengajaran, sumber daya, dan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran. Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi elemen penting, menuntut evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan ini memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sektor maritim. Aspek ekonomi tak dapat diabaikan, dengan evaluasi yang mempertimbangkan kemampuan lulusan mendapatkan pekerjaan di sektor maritim dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Keterlibatan stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri maritim, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, menjadi penutup evaluasi yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pendidikan maritim dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: kebijakan, pendidikan, maritim, pengetahuan, pesisir

Abstract

Evaluation of maritime education policies is an important step in measuring their impact on improving the knowledge and livelihoods of coastal communities. This evaluation covers several main dimensions, the first of which is the accessibility of marine education. Assessment of maritime school locations, scholarship availability, and educational infrastructure helps ensure equitable access to education in coastal communities. The quality of learning is also a focus, with an assessment of teaching methods, resources, and community involvement in learning. Empowering coastal communities is an important element so it requires an evaluation of the extent to which this policy provides practical skills that can be applied in daily life and the maritime sector. The economic aspect cannot be ignored, the assessment considers the ability of graduates to get jobs in the maritime sector and their impact on the local economy. The involvement of stakeholders including government, educational institutions and maritime industry, as well as ongoing monitoring and evaluation, concluded a comprehensive evaluation to ensure the sustainability and effectiveness of maritime education policies in providing real benefits for coastal communities.

Keywords: policy, education, maritime, knowledge, coastal

PENDAHULUAN

Pendidikan maritim adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat pesisir, terutama di negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Pendidikan maritim bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut, mengembangkan sektor maritim, dan menciptakan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Pendidikan maritim melibatkan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir memiliki hubungan yang kuat dengan lautan dan sumber daya kelautan. Mata pencaharian mereka sangat bergantung pada pengetahuan maritim dan keterampilan terkait yang diperlukan untuk mata pencaharian seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan maritim. Kebijakan pendidikan maritim, yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan maritim masyarakat pesisir, telah diadopsi di berbagai negara dengan tujuan mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir (Soeprodjo et al., 2020) Di Indonesia, pendidikan anak nelayan pesisir pantai pada umumnya memiliki masalah yang sama yaitu tingkat pendidikan rendah dan kehidupan sosial ekonomi tidak memadai (Masri, 2017).

Pendidikan menjadi suatu problema di kehidupan masyarakat pesisir pantai, padahal pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan dan perpanjangan hidup manusia. Selain itu, pendidikan diperlukan untuk membuat masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi manusia agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga Negara (Rini & Tari, 2013). Pendidikan berdasarkan jalurnya dibagi menjadi dua yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang ada dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Pendidikan pada jalur formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Dan ciri dari pendidikan formal adalah prosesnya berlangsung di ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga formal tersebut (Anisa & Waloyo, 2021).

Sekolah adalah tempat untuk anak-anak belajar, menuntut ilmu. Selain itu, sekolah menjadi wadah bagi siswa dalam mengembangkan potensi diri dan membentuk jati diri (Anisa & Waloyo, 2021) Sekolah memberi pengaruh terhadap pembentukan serta pengembangan karakter siswa (Anisa & Waloyo, 2021) Sekolah adalah tempat untuk anak-anak belajar dan menuntut ilmu. Selain itu, sekolah menjadi wadah bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya yang dapat membentuk jati diri seorang pelajar (Anisa & Waloyo, 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai hasil observasi wawancara dan dokumentasi secara mendalam tentang Evaluasi Kebijakan Pendidikan Maritim di pesisir pantai Kec. Galesong Kab. Takalar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Hutahaean et al., 2023) Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati (Moha, 2019) Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Daulay et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan pendidikan maritim merupakan proses penting dalam menilai dampaknya pada peningkatan pengetahuan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Sehingga pentingnya pendidikan menjadi faktor utama dalam membangun manusia untuk mencapai kesejahteraan (Putra, Nasir, e Rozaini 2018). Fokus evaluasi dapat dibagi menjadi beberapa dimensi kunci. Pertama, aksesibilitas pendidikan maritim perlu diperhatikan agar masyarakat pesisir memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan. Seharusnya masyarakat pesisir Nusantara adalah masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang baik dan dapat menjadi masyarakat yang mandiri, maju, dan mampu bersaing guna mencapai kesejahteraan, kemajuan bangsa, dan negara (Asra, n.d.j). Hal ini mencakup pertimbangan lokasi sekolah, ketersediaan beasiswa, dan infrastruktur pendidikan yang mendukung. Kedua, evaluasi harus memperhatikan kualitas pembelajaran yang disediakan oleh kebijakan pendidikan maritim. Aspek-aspek seperti metode pengajaran, sumber daya pendidikan, dan keterlibatan komunitas dalam proses pembelajaran menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Sarana dan prasarana tersebut berupa tersedianya fasilitas sekolah yang didalamnya terdapat ruang belajar, perpustakaan, ruang laboratorium, dan segala sesuatu yang mendukung proses belajar mengajar (Putra et al., 2018).

Selanjutnya, evaluasi harus mengarah pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan maritim tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan sektor maritim. masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang sangat populer dengan berbagai aktivitas kelautannya dan berprofesi sebagai nelayan ikan (Achmad 2022). Fokus pada pemberdayaan masyarakat mencakup evaluasi terhadap apakah kebijakan ini memberikan kontribusi positif pada kemandirian dan ekonomi lokal. Selain itu, dampak ekonomi dari kebijakan pendidikan maritim juga menjadi dimensi evaluasi yang krusial. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat pesisir diharapkan dapat tercermin dalam peningkatan mata pencaharian mereka di sektor maritim.

Peran keterlibatan stakeholder juga perlu dievaluasi dalam konteks kebijakan pendidikan maritim. Keterlibatan aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, industri maritim, dan masyarakat pesisir dapat memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini. Evaluasi ini mencakup sejauh mana stakeholder terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta sejauh mana mereka berkontribusi pada kesuksesan program pendidikan maritim. pendidikan harus didukung oleh semua stakeholder (Amrullah et al., 2021). Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan dan adaptasi kebijakan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan industri maritim.

Untuk mengukur efektivitas kebijakan pendidikan maritim, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan hasil dari evaluasi multidimensi ini. Dengan mengevaluasi aksesibilitas pendidikan, kualitas pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dampak ekonomi, keterlibatan stakeholder, dan melibatkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, dapat dilihat sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuan peningkatan pengetahuan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Kesimpulannya, evaluasi ini menjadi instrumen kritis dalam mengidentifikasi keberhasilan dan area peningkatan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan dampak positif kebijakan pendidikan maritim bagi masyarakat pesisir.

Kondisi Kehidupan Nelayan di Pantai Galesong

1. Kondisi Sarana Prasarana (Papan)

Kondisi perumahan penduduk di pantai galesong sebagian besar telah menggunakan dinding yang terbuat dari tembok. Namun, masih ada beberapa unit rumah yang dindingnya terbuat dari setengah tembok dan dinding kayu. Sebagian besar juga dasar lantai penduduk desa seilale ada yang sudah dasar dan ada juga yang belum di dasar.

Adapun rumah tempat tinggal menurut jenis dinding dari 20 responden yakni 5 kepala keluarga memiliki rumah dengan dinding tembok atau sebanyak 20 persen. Sedangkan 11 kepala keluarga memiliki rumah dengan dinding setengah tembok atau sebanyak 70 persen dan 4 kepala keluarga yang memiliki rumah dengan dinding kayu dengan presentase 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 15 kepala keluarga masih dikategorikan miskin, karena memiliki rumah dengan dinding yang masih setengah tembok (semi permanen) dan dinding kayu.

Untuk sebuah keluarga, rumah merupakan kebutuhan dasar yang bila tidak dimiliki oleh sebuah keluarga maka keluarga itu dapat digolongkan ke dalam kelompok masyarakat miskin. Dalam hal ini, terdapat contoh kasus dalam penelitian tersebut. Dimana dalam penelitian tersebut terdapat kepala keluarga diwawancara secara langsung. "Bapak Salampe yang berperan sebagai nelayan dipantai tersebut hanya mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Itupun upa yang di dapat hanya dihabiskan pada waktu dan hari itu saja.

2. Kondisi Kebutuhan Sandang

Kebutuhan belanja sehari-hari masyarakat pesisir pantai galesong pada umumnya cenderung ke desa tetangga. Hal ini dikarenakan pekerjaan mereka sehari-harinya hanya dengan melaut atau sebagai nelayan sehingga pusat belanja untuk kebutuhan pangan sehari-harinya tidak ada. Sebagian besar Masyarakat daerah pesisir pantai galesong mereka hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pangan pada hari-hari besar saja (Acara pernikahan, natal dan tahun baru). Fasilitas perdagangan dan jasa di tempat tersebut masih sangat minim dan hal ini dikarenakan kehidupan masyarakatnya adalah hanya dengan nelayan. Hasil tangkapan yang mereka dapat kemudian langsung dipasarkan hanya pada desa tetangga dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Itupun hasil yang diperoleh masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk alakadarnya dicukupkan saja.

3. Kondisi Kebutuhan Pangan

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan salah satu pekerjaan pokok bagi masyarakat nelayan pesisir di pantai galesong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang salah satunya adalah kebutuhan pangan. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di pantai galesong oleh para nelayan dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas mata pencarian mereka. Pangan Masyarakat pantai galesong kebanyakan mereka ambil sendiri dari hasil melaut mereka sehari-hari. dikarenakan mereka kalau ke pasar juga harus mengeluarkan biaya yang tak terduga, untuk itu mereka hanya ke pasar seminggu dua sampai tiga kali saja.

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan penelitian tingkat pendidikan responden sangatlah memprihatinkan. Dimana rata-rata pendidikan tertinggi mereka adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan selebihnya tidak tamat Sekolah Dasar. Sedangkan yang tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebanyak 8 orang. Dapat dijelaskan bahwa dari 20 nelayan yang diteliti terdapat 4 orang atau 21 persen responden yang tidak tamat Sekolah Dasar, 5 orang atau 32 persen responden yang tamat Sekolah Dasar dan yang tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama 8 orang atau 40 persen dan 3 orang atau 7 persen yang tamat Sekolah Menengah Atas.

Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan nelayan di Desa Seilale masih sangat rendah. Latar belakang pendidikan seseorang nelayan memang bagi mereka tidaklah penting. Artinya karena pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan bagi mereka tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam melaut. Bagi mereka persoalan dari arti pentingnya tingkat pendidikan ini dianggap penting ketika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dan tidak semua nelayan tidak menyekolahkan anaknya, karena mereka beranggapan bahwa pendidikan itu lebih penting dan harus lebih baik dari seorang orang tua.

5. Jumlah Tanggungan Keluarga

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan salah satu pekerjaan pokok bagi masyarakat nelayan pesisir di pantai galesong. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sebagai konsekuensi logis dari kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga ialah semakin besar jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, semakin besar pula pengeluaran yang harus dikeluarkan. Selanjutnya bila pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, maka akan mengalami ketidakcukupan dalam membiayai biaya hidup yang layak untuk keluarganya seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Karena bila sebuah keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, maka keluarga tersebut tergolong sebagai kelompok masyarakat miskin. Dengan kata lain jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi miskin atau tidaknya sebuah keluarga.

6. Teknologi

Dari segi teknologi atau alat yang digunakan dalam menangkap ikan, yaitu adanya jaring(jala)dalam menangkap ikan yang dibantu oleh mesin sebagai alat untuk membantu penarikan ikan yang telah masuk pada jala itu. Di daerah itu tidak lagi menggunakan pancing sebagai alat manual dalam penangkapan ikan.walaupun nelayan menggunakan alat itu, tidak selamanya mendapatkan ikan yang banyak melainkan hanya sebaliknya. Apalagi pada musim hujan dan angin kencang para pelaut tidak dapat menghasilkan ikan banyak karena tidak tenangnya ombak di tengah laut dan bahkan dapat membahayakan. Semua itu bergantung pada ketentuan rezeki.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan maritim berdampak besar terhadap peningkatan pengetahuan dan penghidupan masyarakat pesisir. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan khusus, pendidikan maritim mempersiapkan masyarakat pesisir dengan pengetahuan yang relevan di industri maritim seperti navigasi, teknologi maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, dan keamanan maritim, sehingga membuka peluang luas untuk peningkatan keterampilan dan daya saing di pasar tenaga kerja. Melalui edukasi ini juga ditumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan sehingga meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut pada masyarakat pesisir. Dalam konteks peningkatan penghidupan, pendidikan kelautan menawarkan peluang karir yang lebih beragam, mulai dari industri pelayaran, perikanan, wisata bahari, hingga teknologi maritim dan pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini tidak hanya memperluas kesempatan kerja, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha yang berhubungan dengan kelautan, seperti budidaya laut, pengolahan makanan laut, dan industri pariwisata pesisir. Namun tantangan seperti akses terhadap pendidikan berkualitas dan terbatasnya infrastruktur pendukung di wilayah pesisir serta potensi kesenjangan pengetahuan antara mereka yang menerima pendidikan kelautan dan mereka yang tidak perlu diatasi. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pendidikan maritim perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan, serta meningkatkan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat pesisir, melalui kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4985–4994.
- Amrullah, R. A., Raharjo, B. J., & Kusumawardhana, Y. B. (2021). Quality Program Life Cycle Sebagai Model Diklat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Riset. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 19(1), 25–39.
- Anisa, N. L., & Waloyo, E. (2021a). Problema Pendidikan Anak Pesisir Pantai Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 167–176.

- Anisa, N. L., & Waloyo, E. (2021b). Problema Pendidikan Anak Pesisir Pantai Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 167–176.
- Anisa, N. L., & Waloyo, E. (2021c). Problema Pendidikan Anak Pesisir Pantai Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 167–176.
- Asra, M. A. (n.d.). *Pentingnya Pembekalan Pendidikan Kemaritiman Yang Sesuai Untuk Masyarakat Pesisir Khususnya Di Pulau Tunda Serang, Banten*.
- Bhegawati, D. A. S., Suryandari, N. N. A., & Novarini, N. N. A. (2020). Peranan Ibu Rumah Tangga Nelayan di Desa Kusamba dalam Pengelolaan Keuangan dari Usaha Hasil Perikanan untuk Meningkatkan Eonomi Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*.
- Daulay, N., Purba, A. A., Rahmi, A. M., Wahyudi, D. R., Lubis, H. A., & Nasution, P. K. (2022). Peran Layanan Konseling Individu terhadap Motivasi Belajar Siswa di Desa Timbang Lawan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 4872–4876.
- Fitriah, E. (2015). Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Tumbuhan Mangrove Sebagai Pangan Alternatif Untuk Menghadapi Ketahanan Pangan. *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains*, 4(2).
- Hutahaean, J. T., Asbari, M., & Nurwanto, F. (2023). Urgensi Sadar Lingkungan di Era Teknologi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 47–49.
- Masri, A. (2017a). Pendidikan Anak Nelayan Pesisir Pantai Donggala (The Education for Coastal Fishermen Children in Donggala). *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1).
- Masri, A. (2017b). Pendidikan Anak Nelayan Pesisir Pantai Donggala (The Education for Coastal Fishermen Children in Donggala). *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 1(1).
- Mukramin, S. (2018). Strategi bertahan hidup: masyarakat pesisir suku bajo di Kabupaten Kolaka Utara. *Walusuji*, 9(1), 175–186.
- Nulhaqim, S. A., Gunawan, W., & Sulaeman, M. (2023). Homogeneity of Livelihoods of Bajo Tribe Fishermen: Analysis of Determinant Factors of Poverty and Local Economic Empowerment Strategies. *Migration Letters*, 20(S9), 1483–1493.
- Nur, M. I. (2019). Gambaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Khususnya Nelayan. *Makasar: Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*.
- Purifyningtyas, H. Q., & Wijaya, H. B. (2016). *Kajian kapasitas adaptasi masyarakat pesisir Pekalongan terhadap kerentanan banjir rob*.
- Putra, P. D., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018a). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kesehatan di Kota Gunung Sitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operating Region (mor) i–Terminal bahan bakar minyak (TBBM) gunung sitoli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 776–786.
- Putra, P. D., Nasir, M., & Rozaini, N. (2018b). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Kesehatan di Kota Gunung Sitoli: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operating Region (mor) i–Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Gunung Sitoli. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 776–786.

- Rini, Y. S., & Tari, J. P. S. (2013). Pendidikan: hakekat, tujuan, dan proses. *Jogyakarta: Pendidikan Dan Seni Universitas Negeri Jogyakarta*.
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika, 11*(1), 79–84.
- Soeprodjo, R. G., Ruru, J., & Londa, V. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik, 6*(89).